

## Konflik dan wacana media dalam pembangunan gereja di Palembang: analisis jaringan diskursus

Oemar Madri Bafadhal<sup>\*)</sup>, Erlisa Saraswati, Adi Inggit Handoko

*Department of Communication, Universitas Sriwijaya*

*Km 32 Palembang-Prabumulih Avenue, Indralaya, Ogan Ilir, Indonesia*

Email: oemarmadribafadhal@fisip.unsri.ac.id and Phone Number: + 6282176417485

*English Title: Conflict and media' discourse in Palembang' church construction: a discourse network analysis*

**How to Cite This Article:** Bafadhal, O.M. et al. (2024). Konflik dan wacana media dalam pembangunan gereja di Palembang: analisis jaringan diskursus. *Jurnal Studi Komunikasi*, 8(1). doi: 10.25139/jsk.v8i1.6257

Received: 10-05-2023, Revision: 23-12-2023, Acceptance: 18-03-2024, Published online: 31-03-2024

**Abstract** Religious community relations in Indonesia require much attention as religious identity is frequently used to gain political power. One of the issues that is frequently politicised is the establishment of places of worship. The interrelationships of various groups that unite their power to become a force in legitimising the rejection of the establishment of places of worship must be investigated further. This study employed the Discourse Network Analysis technique to describe the discourse in the news reporting on establishing a church in Palembang. Twenty-five news stories from thirteen Palembang news portals were investigated, analysed using DNA and visualised using Visone. The findings show that various groups are involved, including church-building committees, community organisations, religious organisations, cultural organisations, political parties, and government institutions. The common argument is that the construction of houses of worship must be halted because it does not follow procedures. Political parties are central to this network. This implies that the relevant stakeholders could not keep the conflict out of politics. Meanwhile, the absence of parties who should have been present to maintain tolerance is an important entry point to ensure this does not happen again.

**Keywords:** discourse network analysis; establishment of church; inter-religion relations

**Abstrak** Penggunaan identitas keagamaan sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan menjadikan hubungan antar agama di Indonesia krusial untuk diperhatikan. Pendirian tempat ibadah menjadi salah satu peristiwa yang kerap dipolitisasi. Relasi antar aktor perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk menunjukkan bagaimana kelompok berbeda menyatukan kuasa yang dimilikinya untuk menjadi melegitimasi penolakan pendirian gereja. Penelitian ini menggunakan Discourse Network Analysis untuk menggambarkan jaringan wacana dalam pemberitaan tentang konflik pendirian Gereja di Kota Palembang. Dua puluh lima berita dari tiga belas portal berita di Palembang dianalisis menggunakan aplikasi DNA dan divisualisasikan dengan Visone. Hasilnya menunjukkan isu ini memiliki beragam kelompok mulai dari panitia pembangunan gereja, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kesukuan, partai politik, dan lembaga pemerintahan. Wacana yang paling banyak muncul adalah pembangunan rumah ibadah harus dibatalkan karena pembangunan tidak sesuai prosedur. Kelompok dari partai politik menjadi sentral dalam jaringan ini. Ini mengindikasikan stakeholder terkait gagal dalam menjaga konflik ini lepas dari politik. Sementara itu absennya pihak-pihak yang seharusnya hadir dalam menjaga toleransi menjadi titik masuk penting agar hal ini tidak terulang.

**Kata Kunci:** analisis jaringan wacana; hubungan antar agama; pembangunan gereja

<sup>\*)</sup> Corresponding Author

## PENGANTAR

Relasi antar umat beragama di Indonesia menuntut banyak perhatian (Afdillah & Maarif, 2021; Nirzalin & Febriandi, 2022). Keragaman keagamaan berkelindan dengan isu identitas, ekonomi, dan politik berujung pada penggunaan identitas keagamaan sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan (Supratikno, 2019). Hal ini menjadikan hubungan antar umat beragama sering kali dipolitisasi untuk kepentingan segelintir kelompok (Nastiti & Ratri, 2018). Salah satu isu yang kerap dipolitisasi adalah pendirian tempat ibadah (Dahlan & Aslamiyah, 2022). Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) mencatat sepanjang tahun 2015-2018 ada 51 gereja yang ditolak keberadaannya karena tidak mendapat izin pendirian rumah ibadah lantaran tersandung rekomendasi dan sikap pejabat daerah (BBC, 2021). Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah yang diharapkan mengurangi konflik horizontal akibat pembangunan tempat ibadah, justru menambah kompleksitas birokrasi (Azhari, 2014; Gudorf, 2012; Hutabarat, 2017) yang dihadapi oleh kelompok minoritas dalam membangun tempat beribadah.

Penolakan pendirian tempat ibadah juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Pendirian gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) di Plaju, Jakabaring, dan Alang-Alang Lebar mengalami resistensi dari tokoh agama dan berbagai organisasi masyarakat muslim. Ketegangan ini tidak hanya melibatkan pihak-pihak terkait, tapi juga melibatkan pemerintah di tingkat legislatif dan eksekutif, partai politik, serta pemuka agama (Shmueli et al., 2014). Mereka menjadi aktor politis yang membuat pernyataan publik terkait dengan isu ini (Leifeld, 2020). Dalam konflik antar umat beragama, hubungan antar aktor perlu ditelisik lebih lanjut untuk menunjukkan keterkaitan berbagai kelompok dengan karakteristik berbeda namun menyatukan kuasa yang dimilikinya untuk menjadi kekuatan dalam melegitimasi penolakan pendirian tempat ibadah (Afdillah & Maarif, 2021). Aktor yang terlibat kemudian membuat berbagai klaim berisi dukungan atau penolakan terhadap isu pembangunan rumah ibadah. Klaim ini bermanfaat mengurangi ketidakpastian dari aktor lain sehingga dalam konteks politik berguna untuk menarik calon koalisi dan pemilih (Leifeld, 2020).

Klaim dukungan atau penolakan terhadap isu pembangunan rumah ibadah diamplifikasi oleh media. Media dimanfaatkan beragam organisasi untuk mendapatkan dukungan publik bagi kelompoknya (Anshori, 2014; Facal, 2020). Lebih lanjut, media dalam hal ini menjadi arena kontestasi simbolik (Setiyono, 2014), bagi para aktor yang terlibat dalam wacana pembangunan tempat ibadah. Sehingga dalam adu argumen di dalam media, terdapat bias yang dapat mendistorsi realita (Yun et al., 2018).

Hal ini diperparah dengan intensitas pemberitaan terkait intoleransi di Indonesia yang kurang memiliki nuansa untuk meminimalisir atau menyelesaikan konflik, namun justru liputan yang tidak berimbang sehingga berdampak pada berlanjutnya konflik yang terjadi (Susanto, 2019; Veronika & Murtiningsih, 2022). Oleh karena itu, investigasi secara komprehensif terhadap berita dan media dapat membantu kita memahami dimensi kultural dari peristiwa ini (Stoddart & Tindall, 2015).

Untuk membantu menghubungkan keterkaitan antara aktor, kelompok, dan wacana di dalamnya peneliti menggunakan metode *Discourse Network Analysis* (DNA). DNA adalah suatu metode dalam ilmu sosial yang digunakan untuk menggambarkan wacana politik dalam sebuah jaringan (Buckton et al., 2019; Fergie et al., 2019; Siagian, 2020). Metode ini dapat memperlihatkan secara holistik aktor dan kelompok yang terlibat serta bagaimana media turut mengadvokasi kepentingan-kepentingan aktor tersebut. Selama ini konflik umat beragama hanya dilihat dari sudut pandang resolusi konflik (Wijayanto, 2021), mediasi (Mayyasya et al., 2022), dan peran berbagai pihak (Budiman et al., 2019; Sinangsih, 2019) dalam penyelesaian konflik tersebut. Sementara itu, dari sisi wacana pemberitaan, peristiwa ini hanya dilihat dari konteks pemingkai media (Setiono, 2012). Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan melihat jaringan wacana yang muncul sehingga aktor dan relasi antar aktor dapat terlihat dan menggambarkan konflik pembangunan rumah ibadah secara lebih utuh dan komprehensif. Dengan mempekerjakan DNA, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana jaringan wacana dalam pemberitaan tentang konflik pendirian tempat ibadah Gereja di Palembang.

Studi ini secara praktis penting untuk membantu memahami dan mengatasi ketegangan serta konflik yang muncul di sekitar pendirian tempat ibadah di Palembang, dengan mengidentifikasi bagaimana aktor, kelompok, dan media mempengaruhi dinamika sosial dan politik. Secara akademis, studi ini memberikan wawasan baru dalam ilmu sosial, khususnya melalui penggunaan Discourse Network Analysis (DNA), untuk menggambarkan secara holistik bagaimana jaringan wacana terbentuk dan mempengaruhi persepsi publik serta kebijakan terkait konflik antar umat beragama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Discourse Network Analysis (DNA) untuk menggambarkan wacana politik dalam jaringan terkait konflik pembangunan gereja di Kota Palembang, mengacu pada metodologi yang dijelaskan oleh Buckton et al. (2019), Fergie et al. (2019), dan Leifeld (2020). Tahap awal penelitian melibatkan data crawling di Google News, yang menghasilkan 25 berita dari 13 portal berita di Palembang. Data ini kemudian diolah menggunakan program *Discourse Network Analyzer*, dimana data dimasukkan ke dalam *database* DNA menggunakan Local DNA File. Selanjutnya, peneliti melakukan kategorisasi data dengan menambahkan statement untuk setiap wacana yang muncul dalam berita, membaginya menjadi empat kategori besar: *person*, *organization*, *concept*, dan *agreement*, yang masing-masing merujuk pada aktor yang memberikan pernyataan, afiliasi organisasi, konsep abstrak yang dibahas, dan persetujuan terhadap konsep yang dibahas.

Setelah pengumpulan data selesai, peneliti melakukan ekspor data menggunakan fitur 'open export network dialog' dari aplikasi DNA. Data tersebut diekspor ke dalam beberapa kategori untuk menganalisis jaringan wacana: menghubungkan person dengan organization untuk melihat jaringan aktor dan afiliasi organisasinya, menghubungkan organization dengan concept untuk mengamati jaringan wacana yang muncul dari organisasi-organisasi, serta menghubungkan person dengan concept untuk menghitung derajat sentralitas dan keperantaraan masing-masing aktor dalam jaringan. Data hasil ekspor ini disimpan dalam format graphml. Selanjutnya, peneliti menggunakan aplikasi visualisasi data, Visone (Brandes & Wagner, 2004), untuk menganalisis dan memvisualisasikan jaringan wacana. Fitur 'quick layout' digunakan untuk merapikan tampilan jaringan, sementara kustomisasi dilakukan untuk memudahkan interpretasi. Visone juga digunakan untuk menganalisis derajat sentralitas dan keperantaraan, yang hasilnya diekspor dalam format CSV Excel (.xlsx).

Dalam penelitian ini, analisis derajat sentralitas dan keperantaraan dilakukan terhadap aktor-aktor yang muncul dalam jaringan wacana. Derajat sentralitas dihitung untuk menentukan jumlah relasi antara satu aktor dengan aktor lain, mengindikasikan popularitas aktor tersebut dalam jaringan. Sementara itu, derajat keperantaraan menggambarkan peran aktor dalam konteks penyebaran informasi, dengan aktor yang memiliki keperantaraan tinggi berperan penting dalam menghubungkan aktor-aktor lain dalam jaringan. Penelitian ini menyesuaikan konsep-konsep dalam jaringan komunikasi berdasarkan tujuan penelitian dan ketersediaan data (Eriyanto, 2014).

## **TEMUAN HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelusuran dengan Google, dapat diketahui bahwa terdapat tiga belas portal berita yang memberitakan peristiwa penolakan pembangunan tempat ibadah di Palembang. Sebelas di antaranya adalah media dengan skala lokal sementara dua sisanya adalah media berskala nasional. Informasi lebih lengkapnya terlihat di Tabel 1.

Dari ketiga belas media yang ada, penulis melakukan penelusuran pada website Dewan Pers untuk menemukan apakah portal berita ini memiliki izin penerbitan dari Dewan Pers. Hal ini menjadi salah satu cara penulis untuk mengukur kredibilitas dari media yang ada. Penelusuran tersebut menunjukkan dari tiga belas portal berita, terdapat enam portal berita yang tidak terdaftar dalam data perusahaan pers di Dewan Pers. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran, munculnya media online yang tidak kredibel dalam isu ini dapat mendorong adanya pemberitaan yang tidak imparial, berkurangnya verifikasi data, serta pencampuran opini dan fakta yang pada akhirnya dapat mendorong meluasnya isu-isu intoleransi (Ibrahim, 2020; Sulastiana, 2017). Absennya media arus utama dalam memberitakan hal ini berdampak pada tingginya intensitas media lokal dan media alternatif dalam wacana pemberitaan penolakan pembangunan gereja di kota Palembang, strategi memanfaatkan media lokal sebenarnya dapat

menjadi salah satu alternatif untuk pembuatan wacana tandingan dari media arus utama, namun kurangnya kredibilitas sumber dan teknik penulisan yang belum profesional dapat menjadi kontraproduktif dalam pemberitaan tentang konflik ini (Sulastiana, 2017).

**Tabel 1.** Media yang Memuat Berita Konflik Pembangunan Gereja

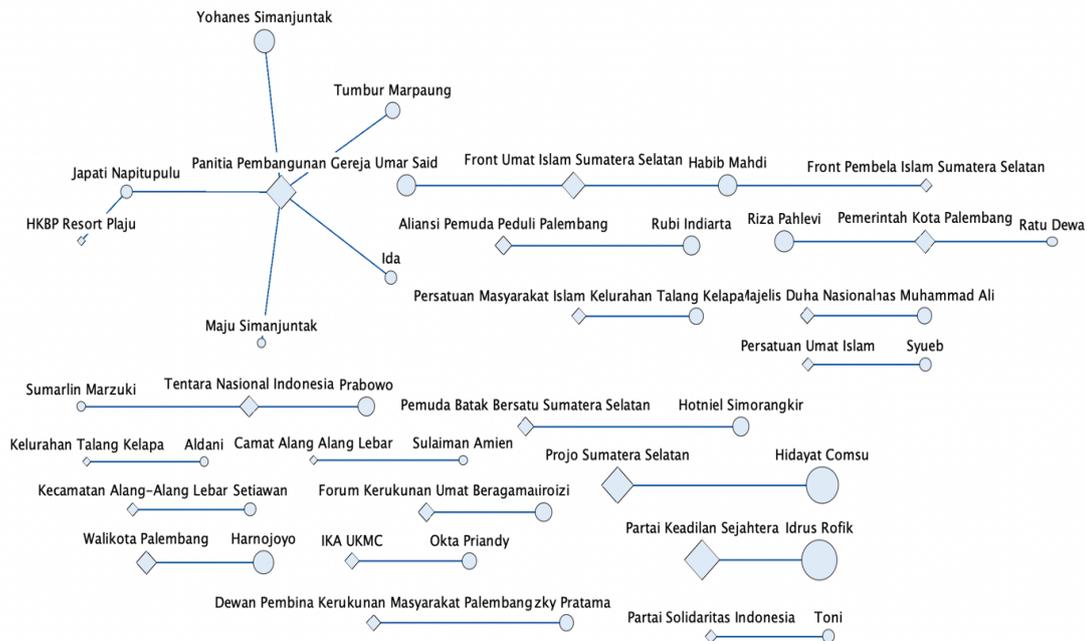
No.	Nama Media	Skala Media	Jumlah Berita
1.	Ampera.co	Lokal	2
2.	Berita Musi	Lokal	2
3.	Berita Pagi	Lokal	2
4.	Media Sriwijaya	Lokal	1
5.	Media Sumatera	Lokal	4
6.	Merdeka	Nasional	1
7.	Republika	Nasional	1
8.	Sripoku	Lokal	5
9.	Sriwijaya Zone	Lokal	1
10.	Sumatera X Post	Lokal	2
11.	Sumeks.co	Lokal	1
12.	Sumsel Jarrak Pos	Lokal	2
13.	Sumsel News	Lokal	1
Total			25

Sumber: diolah penulis (2022)

Sejatinya, pemberitaan media yang masif menjadi aspek penting dalam diskursus penolakan pembangunan tempat ibadah, karena persaingan media dianggap dapat menyeimbangkan wacana yang berlaku. Namun, *pragmatisme komersialisasi* membuat media enggan mempublikasikan berita ini. Berita-berita tentang intoleransi tidak dapat dimuat kecuali dalam konten terbatas atau terdapat konflik dalam skala yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa media masih berupaya untuk mempertahankan *status-quo* dan tidak ingin mempertaruhkan eksistensinya dengan memberitakan hal-hal yang dianggap sensitif oleh masyarakat luas (Setyabudi, 2021; Steele, 2019).

Dari Gambar 1 dan Gambar 2, peneliti merumuskan kronologi penolakan pembangunan gereja di kota Palembang. Peristiwa ini dibagi menjadi tiga periode yaitu tahun 2009, 2014-2019, dan 2020-2022. Dari hasil ini, ditemukan bahwa penolakan pendirian rumah ibadah gereja berlangsung sejak tahun 2009. Pada tahun ini, penolakan dilakukan dengan melakukan aksi demonstrasi di lokasi pembangunan rumah ibadah. Pada tahun 2009 pembangunan gereja yang ditolak terletak di Jakabaring dan Plaju. Isu yang muncul dalam penolakan adalah ketidaksetujuan masyarakat sekitar akan pembangunan gereja. Pada tahun 2014, rencana pendirian rumah ibadah kembali muncul, kali ini pada pendirian rumah ibadah gereja di Alang-Alang Lebar. Rencana ini terpaksa dihentikan karena terjadi unjuk rasa penolakan rumah ibadah dengan alasan pembangunan belum sesuai prosedur. Pada tahun 2019 pihak Walikota Palembang yang diwakili oleh Juru Bicara Walikota mengingatkan bagi para pihak yang ingin membangun tempat ibadah harus taat aturan.

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Wacana ini didorong dari Sekretaris Daerah Kota Palembang yang memulai rapat pendirian rumah ibadah gereja di Alang-Alang Lebar. Hal ini mendorong munculnya berbagai wacana di permukaan di antaranya kembali mencuat ketika ketika terjadi Paripurna antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Agenda Rancangan Peraturan Daerah isu pembangunan gereja di Alang-Alang Lebar kembali mencuat dan menimbulkan pro dan kontra. Hal ini mendorong pihak TNI melakukan verifikasi lokasi pembangunan gereja. Pada tahun 2021 Hingga tahun 2022 kejadian ini belum juga selesai dan para pihak masih berupaya untuk menyelesaikannya dengan visi masing-masing. Selama waktu-waktu itu tidak ada argumen yang yang berubah, pembangunan gereja masih dinilai menyalahi prosedur. Wacana kesalahan prosedural yang muncul adalah penolakan warga sekitar dan pemalsuan tanda-tangan. Namun kelompok-kelompok yang termasuk dalam jaringan ini semakin bertambah.



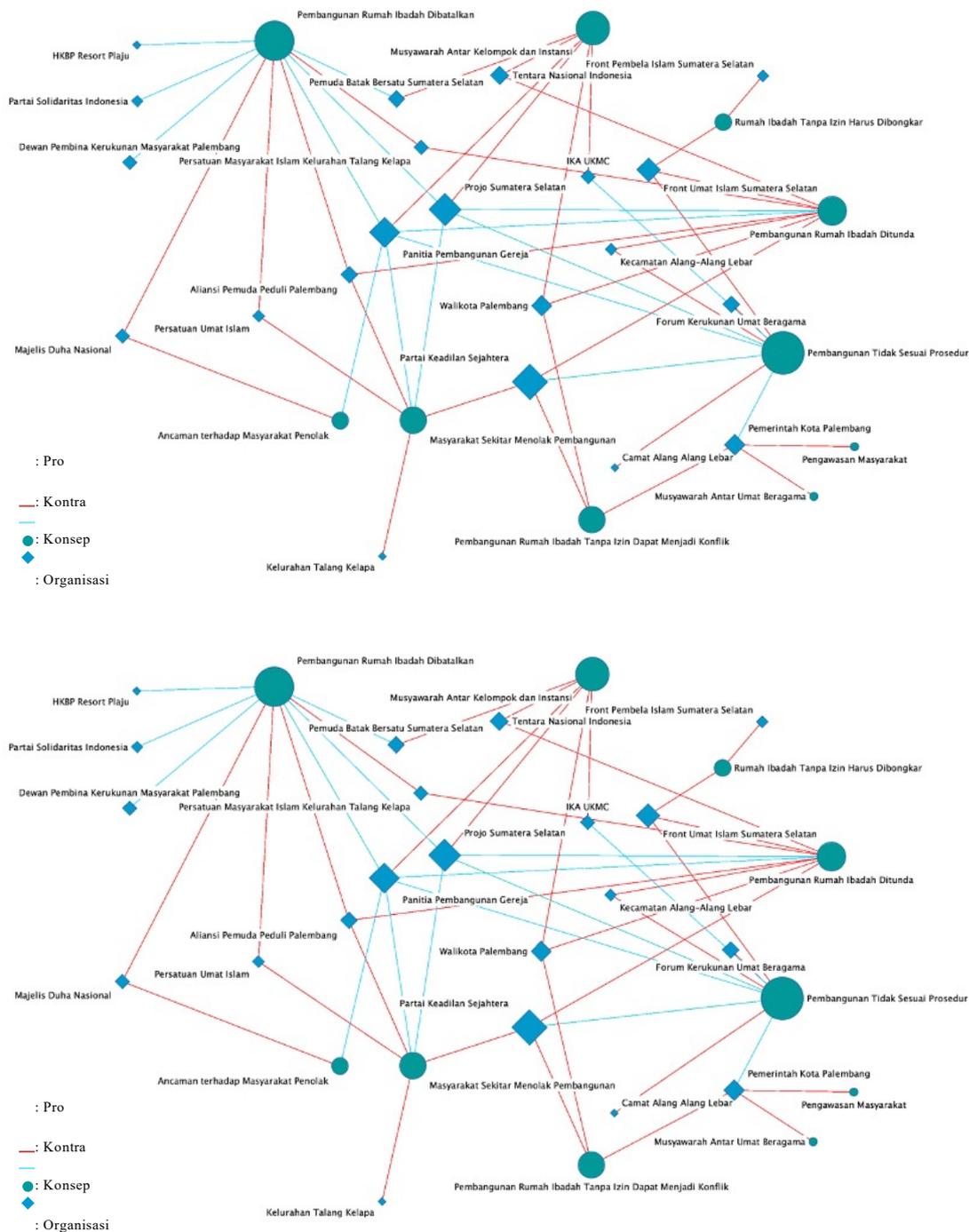
**Gambar 1.** Organisasi dan Aktor yang terlibat  
 Sumber: diolah penulis 2022

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan pemetaan jaringan terhadap kelompok-kelompok yang terlibat, digambarkan dalam Gambar 1. Peneliti menemukan ada 26 aktor dari 20 organisasi yang tergabung dalam jaringan wacana komunikasi pada pemberitaan penolakan pembangunan gereja di kota Palembang. Lebih lanjut, peneliti membagi 20 organisasi tersebut ke dalam enam kategori: (1) panitia pembangunan gereja, (2) organisasi masyarakat nasional, (3) organisasi keagamaan, (4) organisasi kesukuan, (5) partai politik, (6) dan lembaga pemerintahan. Pada kelompok Panitia Pembangunan Gereja, terdapat empat tokoh yang muncul ke dalam jaringan. Salah satunya terafiliasi dengan HKBP Resort Plaju, sementara yang lainnya membawa identitas panitia pembangunan gereja. Dari kelompok ini, tidak teridentifikasi organisasi-organisasi yang lebih besar atau memiliki skala nasional.

Pada organisasi masyarakat nasional terdapat organisasi Dewan Pembina Kerukunan Masyarakat Palembang sedangkan pada organisasi kesukuan diwakili oleh Forum Keluarga Batak Muda Indonesia. Organisasi keagamaan didominasi oleh organisasi keagamaan Islam, di antaranya adalah Front Pembela Islam (FPI) Sumatera Selatan, Front Umat Islam (FUI) Sumatera Selatan, Majelis Duha Nasional (MDN) Kota Palembang, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Masyarakat Islam Kelurahan Talang Kelapa. Organisasi keagamaan termasuk ke organisasi masyarakat yang bersifat reaksioner, dalam kontestasi wacana Islam kontemporer, kelompok reaksioner umumnya merupakan representasi minoritas dari Islam arus utama di Indonesia. Secara umum yang membedakan penerapan nilai-nilai Islamnya ada pada segi kebangkitan Islam dan penerapan hukum Islam di ruang-ruang publik (Setyabudi, 2021).

Kelompok lainnya adalah kelompok yang termasuk ke dalam kategori lembaga pemerintah dalam hal ini terdapat beberapa aktor yang berasal dari Pemerintah Kota Palembang seperti Walikota, Sekretaris daerah, dan jajarannya. Sementara itu di tingkatan Kecamatan dan Kelurahan juga terdapat aktor-aktor yang berperan dalam pembentukan jaringan wacana ini. Sebagai bentuk implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri terdapat juga lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan. Lembaga pemerintah lainnya adalah Tentara Nasional Indonesia, kehadiran militer tentu dalam hal ini menjadi paradoks, di satu sisi keberadaannya dapat alternatif wacana tandingan dari wacana yang dibangun oleh organisasi masyarakat keagamaan namun masuknya militerisme juga perlu diwaspadai sebagai intervensi militerisme ke dalam kehidupan sosial-politik. Kelompok terakhir adalah kelompok yang terafiliasi dengan politik. Kehadiran dua partai yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai

Solidaritas Indonesia. Selain itu terdapat juga kelompok Projo Sumsel sebuah organisasi pendukung Joko Widodo di Sumatera Selatan.



**Gambar 2.** Jaringan Wacana pada Pemberitaan Penolakan Pembangunan Gereja di Kota Palembang  
 Sumber: diolah penulis (2022)

Hadirnya partai politik dari ragam spektrum ini menjadi penting karena politisi lokal banyak yang memakai isu konflik dalam pembangunan rumah ibadah untuk kepentingan politiknya (Crouch, 2010). Absennya kelompok-kelompok moderat dalam jaringan ini terjadi karena isu kedaerahan dan kecenderungan mereka untuk mencari solusi kompromis untuk mempertahankan kekuatan sehingga mempertimbangkan intervensi yang harus dilakukan (Brown, 2019). Lebih lanjut, desentralisasi yang umumnya ada dalam organisasi ini menyerahkan

berbagai fatwa dan kebijakan teologis pada kalangan ulama-ulama lokal (Arifianto, 2017) hal ini menyebabkan lemahnya modal sosial bagi kalangan islam moderat untuk mendorong munculnya wacana alternatif di dalam peristiwa ini. Dari hasil penggabungan antara variabel organisasi dan persetujuan akan konsep didapatkan jaringan terlihat pada gambar 2.

Dari jaringan wacana yang muncul, dapat terlihat dua koalisi besar dalam peristiwa ini. Koalisi pertama adalah koalisi pendukung penolakan pembangunan gereja dan koalisi kedua adalah kelompok yang kontra terhadap penolakan pembangunan gereja. Kedua koalisi bermain di wacana pembangunan tidak sesuai prosedur. Koalisi mendukung pembatalan atau pelarangan pendirian rumah ibadah merasa pembangunan rumah ibadah tidak sesuai prosedur sedangkan yang mendukung menggunakan juga menggunakan wacana yang sama dalam sudut yang berbeda, pembangunan harus dilanjutkan karena sudah sesuai dengan prosedur. Dalam hal ini stakeholder pada jaringan yang pro pada penolakan pembangunan lebih banyak (n=18) dibandingkan dengan yang menolak (n=6).

Jaringan wacana tersebut juga menggambarkan, terdapat empat sentimen besar dalam jaringan wacana ini: pembangunan rumah ibadah harus dibatalkan, pembangunan tidak sesuai prosedur, pembangunan rumah ibadah harus ditunda, dan pembangunan rumah ibadah tanpa izin dapat menjadi konflik. Dari sentimen tersebut dapat terlihat bahwa otoritas politik dan keagamaan apabila berkaitan dengan isu-isu lintas agama sering kali menggunakan pendekatan legalistik dan mengabaikan pendekatan etika (Setyabudi, 2021). Sehingga dalam hal ini, tindakan persekusi dan pemidanaan dengan dalih 'menjaga kerukunan', 'menghindari konflik', jadi wacana utama dalam jaringan ini.

Hal ini juga terlihat dari bagaimana beberapa *stakeholder* tidak eksklusif berada dalam satu koalisi tertentu. Pihak yang tergabung dalam instansi pemerintah beberapa kali mengemukakan penolakannya terhadap pembangunan gereja, namun terkadang kembali lagi pada wacana kontra penolakan dengan menekankan perlunya musyawarah lebih lanjut untuk memutuskan hal ini. Begitu juga beberapa LSM yang mendukung pembangunan gereja, kerap kali mendorong perlunya musyawarah. Urgensi melakukan musyawarah dalam hal ini memang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 pasal 21: (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota. Sehingga musyawarah menjadi salah rangkaian panjang administrasi yang harus dilakukan oleh pihak pembangunan gereja, para pihak yang terlibat memakai klaim ini untuk menunda pembangunan gereja.

Selain itu, wacana 'Pembangunan Rumah Ibadah Dibatalkan' ramai dipertentangkan oleh organisasi masyarakat Islam seperti Aliansi Pemuda Peduli Palembang, Persatuan umat Islam, Majelis Duha Nasional, hal ini tidak disetujui oleh kelompok-kelompok dari HKBP Resort Plaju, Partai Solidaritas Indonesia, Dewan Pembina Kerukunan Masyarakat Palembang. Lebih lanjut, pada '*Pembangunan Tidak Sesuai Prosedur*', wacana paling dominan berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, hal ini diperkuat dengan klaim dari beberapa wakil dari Pemerintahan misalnya pejabat dari Kecamatan Alang Alang Lebar dan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi. Projo Sumsel dan Panitia Pembangunan Gereja berusaha untuk memunculkan wacana tandingan namun Prosedur dari kementerian yang sering kali dijadikan sebagai kambing hitam adalah perihal tanda-tangan dari warga sekitar. Sehingga wacana 'Masyarakat Sekitar Menolak Pembangunan' juga muncul dengan cukup besar. Analisis peneliti mengidentifikasi keberagaman terhadap kelompok yang hadir, mulai dari organisasi masyarakat berbasis agama, suku, pemerintah, sampai partai politik berkoalisi namun dengan memegang kepentingan mereka pada saat itu.

Jaringan wacana komunikasi ini juga menunjukkan kontribusi pemerintah dalam konflik pendirian gereja cenderung minim. Sebagai perbandingan, terlihat dari *nodes* yang menggambarkan instansi-instansi pemerintah dalam Gambar 2. cenderung lebih kecil, hal ini menandakan rendahnya wacana pemerintah dalam hal ini. Sementara itu, dari kelompok pro pembatalan rumah ibadah yang paling besar adalah Partai Keadilan Sejahtera sedangkan dari pihak kontra adalah Projo Sumsel. Untuk mempertajam hasil penelitian, peneliti melakukan

analisis derajat keperantaraan dan sentralitas dari aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan ini. Hasilnya disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2.** Hasil Analisis Sentralitas dan Keperantaraan

Nama Aktor	Sentralitas	Keperantaraan
Idrus Rofik	3,704	0,174
Hidayat Comsu	4,623	0,162
Yohanes Simanjuntak	3,703	0,118
Riza Pahlevi	2,777	0,113
Harnojoyo	2,777	0,079

Sumber: diolah penulis (2022)

Nilai sentralitas yang tinggi, secara sederhana mengacu pada tingkat popularitas dari aktor. Dalam hal ini dihitung dari berapa kali aktor terkoneksi dengan aktor-aktor dalam wacana ini. Idrus Rofik dan Hidayat Comsu yang terafiliasi politik memiliki nilai sentralitas yang tinggi. Artinya politisasi isu ini menjadi tinggi. Sementara itu panitia pembangunan gereja berada di peringkat ketiga, meskipun cukup tinggi, artinya secara arus informasi pihak panitia tidak memiliki kuasa yang cukup dalam mengontrol informasi. Hal yang sama di pemerintah, yang justru berada di peringkat keempat dan kelima. Dengan kata lain, arus informasi mengenai pembangunan gereja dan dinamikanya justru berada di tangan kelompok-kelompok politik yang dengan berbagai agenda yang dimilikinya. Hal ini terkadang mendorong perubahan dari berbagai kelompok misalnya pihak Pemerintah Kota Palembang, dalam berbagai konteks mewacanakan hal yang berbeda terkait pembangunan misalnya terkadang wacana penundaan yang muncul namun di sisi lain agenda musyawarah ditonjolkan. Analisis ini mengonfirmasi jaringan yang muncul di Gambar 2.

Berkaitan dengan hal itu, nilai keperantaraan yang tinggi menunjukkan seberapa sering aktor menjadi perantara informasi bagi aktor-aktor lainnya. Hal ini menjadikan orang-orang yang memiliki posisi keperantaraan yang tinggi merefleksikan kekuasaan, karena mereka menjadi orang yang menjembatani seberapa banyak informasi yang bisa dikeluarkan. Dalam hal ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari tahun ke tahun tetap pada prinsipnya menolak hal ini. Hal yang menarik di antaranya adalah, setiap tahun politik hal ini mencuat. Namun, meskipun bukan merupakan partai politik, Projo Sumatera Selatan sebuah kelompok sukarelawan pendukung Presiden Jokowi membuat wacana tandingan yang dibentuk oleh kelompok PKS. Sehingga, dalam hal ini, kehadiran kelompok yang berafiliasi politik menjadi sarana untuk menarik dan mempertahankan dukungan politik dari masing-masing konstituen. Kemunculan isu-isu ini di tahun pemilihan legislatif, presiden, dan pemilihan gubernur juga menjadi indikasi isu ini untuk kepentingan politik.

FKUB yang seharusnya memfasilitasi komunikasi antara pihak yang ingin membangun rumah ibadah dengan pihak lainnya justru tidak banyak muncul di media. FKUB seharusnya berperan sebagai perantara yang menjembatani dan membangun dialog dari kelompok-kelompok yang berkontra. Dalam wacana pemberitaan ini, perannya hampir tidak muncul. Dalam beberapa kasus FKUB memang lebih banyak bermain di belakang layar (Ali-fauzi & Anick, 2011), walaupun dalam kasus ini muncul, namun wacananya bersifat menenangkan *status quo*. Namun dalam hal ini sedikit mengkhawatirkan ketika pemerintah dan FKUB beririsan wacana dengan koalisi pro penolakan pembangunan gereja.

Wacana ini mengafirmasi indikasi penggunaan konflik pembangunan gereja untuk kepentingan politis. Indikasi yang sama ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia, dimana politisi lokal berusaha untuk mengambil keuntungan dari kelompok-kelompok tertentu dengan memanfaatkan isu-isu horizontal (Crouch, 2010). Keengganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penengah dalam konflik ini berkaitan dengan kompromi kuasa politik, dan rendahnya perlindungan bagi kelompok-kelompok minoritas yang pada akhirnya harus menjadi korban dalam hal ini. Hal ini juga menandakan bahwa, konflik ini tidak terjadi dalam ruang hampa, tapi merupakan dampak dari organisasi dengan berbagai kepentingan. Selain itu, dalam hal ini media seharusnya memiliki posisi sebagai penjaga dalam artian yang positif. Media harus berperan sebagai advokator persatuan dari berbagai agama dan keyakinan. Media justru tidak boleh menjadi medium yang mengantarkan informasi yang

kacau dan menjadi sarana untuk perdamaian sekaligus juga mencari kebenaran dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi (Ibrahim, 2020). Selain itu, dari hasil ini juga ditemukan bahwa pihak-pihak yang berkoalisi, di dalam jaringan wacana ini berusaha untuk membangun sebuah hegemoni diskursif. Yang pada awalnya sama juga dengan esensi dari politik (Muller, 2015).

## KESIMPULAN

Artikel ini setidaknya memiliki dua temuan, pertama terlihat bahwa dalam wacana terkait pembangunan gereja di Palembang, polarisasi wacana berkembang dari semula bersifat prosedural ke arah politis. Hal ini ditunjukkan dari masuknya wacana-wacana dari aktor-aktor politik di Palembang. Surat Keputusan Bersama Dua menteri tentang pembangunan tempat ibadah justru menjadi tantangan terbesar bagi kaum minoritas untuk membangun tempat ibadah, hal ini diperlihatkan lewat pemakaian wacana-wacana administratif dari ini yang mendominasi wacana pemberitaan peristiwa ini di media. Temuan kedua, berkaitan dengan absennya aktor-aktor yang seharusnya terlibat dalam pelaksanaan Surat Keputusan Bersama tersebut. Berbagai stakeholder dari FKUB, Pemerintah Provinsi, Wakil dari Kementerian justru hilang dalam wacana ini dan digantikan aktor-aktor dari berbagai kelompok politik yang memiliki wacana tersendiri dalam peristiwa ini.

Menggunakan analisis jaringan wacana menjadi sebuah instrumen yang baik untuk menangkap secara komprehensif peristiwa. Secara umum, kegiatan ini dapat dilakukan untuk mengungkap agenda media bahkan mengevaluasi kebijakan suatu institusi dari waktu ke waktu. Walaupun penggunaan DNA dapat memberikan kebaruan dalam perdebatan wacana terkait pembangunan tempat ibadah. Namun tentu hal ini memiliki keterbatasan karena data yang peneliti miliki hanya terbatas pada pemberitaan hal tersebut di kota Palembang saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Leifeld, 2020; Muller, 2015) media merupakan salah satu arena alternatif dalam perdebatan wacana. Penelitian ini tidak mengungkap komentar-komentar yang terjadi di luar media. Seperti televisi, forum diskusi, rapat-rapat legislatif, dan lain sebagainya. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat berangkat dari keterbatasan ini.

## REFERENSI

- Afdillah, M., & Maarif, S. (2021). Politik lokal dan konflik keagamaan Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-9
- Ali-fauzi, I., & Anick, H. T. (2011). *Disputed Churches in Jakarta*.
- Anshori, D. S. (2014). Wacana Keagamaan Syiah-Sunni Dalam Majalah Tempo Dan Suara Hidayatullah. *Litera*, 13(1), 14-28. <https://doi.org/10.21831/ltr.v13i1.1901>
- Arifianto, A. R. (2017). Practicing what it preaches? Understanding the contradictions between pluralist theology and religious intolerance within Indonesia's Nahdlatul Ulama. *Al-Jami'ah*, 55(2), 241-264. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.55.241-264>
- Azhari, M. S. (2014). Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Problem Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. *Ham*, 11, 35-58.
- BBC. (2021). Kementerian Agama buka peluang "revisi" SKB dua menteri soal pendirian rumah ibadah yang disebut pegiat HAM "kerap menjegal kelompok minoritas memperoleh hak beribadah." BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55879387>
- Brandes, U., & Wagner, D. (2004). Analysis and Visualization of Social Networks. In *Graph Drawing Software* (pp. 321-340). [https://doi.org/10.1007/978-3-642-18638-7\\_15](https://doi.org/10.1007/978-3-642-18638-7_15)
- Brown, G. (2019). Civic Islam: Muhammadiyah, NU and the Organisational Logic of Consensus-making in Indonesia. *Asian Studies Review*, 43(3), 397-414. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1626802>
- Buckton, C. H., Fergie, G., Leifeld, P., & Hilton, S. (2019). A discourse network analysis of UK newspaper coverage of the "sugar tax" debate before and after the announcement of the Soft Drinks Industry Levy. *BMC Public Health*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6799-9>
- Budiman, S., Renaissance, M. S.-J., & 2019, undefined. (2019). Peran Ormas Islam Dalam Menjaga Stabilitas Politik Sosial Budaya Indonesia Pasca Pemilu 2019 (Kajian Pustaka Pada Organisasi Islam Terbesar Nu Dan. *Ejournal-Academia.Org*, 4(02), 560-563.
- Crouch, M. (2010). Implementing the regulation on places of worship in Indonesia: New problems, local politics and court action. *Asian Studies Review*, 34(4), 403-419. <https://doi.org/10.1080/10357823.2010.527921>
- Dahlan, B., & Aslamiyah, R. (2022). Problematika Pendirian Rumah Ibadah Umat Minoritas di Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 21(1), 61. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246>
- Eriyanto. (2014). Analisis Jaringan Komunikasi. *Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, 53(9).
- Facal, G. (2020). Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and its Impact on Growing Religious Intolerance in Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 8(1), 7-20. <https://doi.org/10.1017/trn.2018.15>
- Fergie, G., Leifeld, P., Hawkins, B., & Hilton, S. (2019). Mapping discourse coalitions in the minimum unit pricing for alcohol debate: a discourse network analysis of UK newspaper coverage. *Addiction*, 114(4), 741-753. <https://doi.org/10.1111/add.14514>

Konflik dan wacana media dalam pembangunan gereja di Palembang: analisis jaringan diskursus - doi: 10.25139/jsk.v8i1.6257  
Bafadhal, O.M.

- Gudorf, C. E. (2012). Religion, law, and Pentecostalism in Indonesia. *Pneuma*, 34(1), 57-74. <https://doi.org/10.1163/157007412X621680>
- Hutabarat, B. A. (2017). Evaluasi terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 4(1), 8. <https://doi.org/10.33550/sd.v4i1.41>
- Ibrahim, A. M. (2020). Media Narrative Creation of Inter-Religious Conflict and Its Repercussion on National Development in Nigeria: A Dialectic Discourse on the Media's Role as an Instrument for Conflict Construction and Management. *New Media and Mass Communication*, 33-46. <https://doi.org/10.7176/nmmc/91-04>
- Leifeld, P. (2020). Policy debates and discourse network analysis: A research agenda. In *Politics and Governance* (Vol. 8, Issue 2, pp. 180-183). <https://doi.org/10.17645/pag.v8i2.3249>
- Mayyasya, D. Z., Rahardjo, T., & Lukmantoro, T. (2022). Mediasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia Di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang). *Interaksi Online*, 10(2), 1-13. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Muller, A. (2015). Using discourse network analysis to measure discourse coalitions: Towards a formal analysis of political discourse. *World Political Science*, 11(2), 377-404. <https://doi.org/10.1515/wps-2015-0009>
- Nastiti, A., & Ratri, S. (2018). Emotive politics: Islamic organizations and religious mobilization in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 40(2), 196-221. <https://doi.org/10.1355/cs40-2b>
- Nirzalin, & Febriandi, Y. (2022). Aswaja mobilization and intolerance: Sub-state ideology, religious vigilantism in Aceh, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2089382>
- Setiono, Galih. Dkk. (2012). Pemberitaan Konflik GKI Yasmin Bogor Pada harian Jurnal Bogor dan Radar Bogor. *EJurnal Mahasiswa Universitas Padjadjaran Vol.1., No.1 (2012)*, 1(1), 1-10.
- Setiyono, B. (2014). Does governance reform in a democratic transition country reduce the risk of corruption? Evidence from Indonesia. *Corruption, Good Governance and Economic Development: Contemporary Analysis and Case Studies*, 217-256. [https://doi.org/10.1142/9789814612593\\_0011](https://doi.org/10.1142/9789814612593_0011)
- Setyabudi, M. N. P. (2021). Toleransi dan Dinamika Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 1-13.
- Shmueli, D. F., Collins-Kreiner, N., & Gal, M. Ben. (2014). Conflict over sacred space: The case of Nazareth. *Cities*, 41, 132-140. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2014.06.011>
- Siagian, T. H. (2020). Corona Dengan Discourse Network Analysis. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 09(02), 98-106.
- Sinangsih, W. (2019). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Dan Penyelesaian Konflik Umat Beragama Di Kecamatan Sewon. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(1). <https://doi.org/10.31316/g.couns.v2i1.53>
- Steele, J. (2019). Mediating Islam: Cosmopolitan Journalisms in Muslim Southeast Asia. In *Indonesia* (Vol. 108, Issue 1). University of Washington Press. <https://doi.org/10.1353/ind.2019.0021>
- Stoddart, M. C. J., & Tindall, D. B. (2015). Canadian news media and the cultural dynamics of multilevel climate governance. *Environmental Politics*, 24(3), 401-422. <https://doi.org/10.1080/09644016.2015.1008249>
- Sulastiana. (2017). Peran Media dalam Penyebaran Intoleransi Agama. *Jurnal Ilmu Kependidikan*, 11(2), 114-121.
- Supratikno, A. (2019). Merajut Kembali Komunitas Damai: Studi Landasan Biblis Dan Teologis Resolusi Konflik. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 3(2), 186. <https://doi.org/10.46445/ejti.v3i2.161>
- Susanto, N. H. (2019). Politicization of religion and the future of democracy in Indonesia in populism theory. *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 18(54), 139-158.
- Veronika, & Murtiningsih, B. S. E. (2022). Analysis of conflict: Online media coverage of the St. Lidwina Church incident. *SEARCH Journal of Media and Communication Research*, 14(1), 81-93.
- Wijayanto, W. S. (2021). Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja*, 5(1), 57-73. <https://doi.org/10.37368/ja.v5i1.235>
- Yun, G. W., Park, S. Y., Lee, S., & Flynn, M. A. (2018). Hostile Media or Hostile Source? Bias Perception of Shared News. *Social Science Computer Review*, 36(1), 21-35. <https://doi.org/10.1177/0894439316684481>